



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**2018**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun 2018. Penyusunan RKT Bappeda Taun 2018, sebagai dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 adalah antara lain memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. RKT Bappeda Kota Depok sebagai sebagai acuan penyusunan kebijakan untuk mengakomodir pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Depok yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 ini disusun berdasarkan rumusan substansi yang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Bappeda Kota Depok yang memuat isu-isu strategis, Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Depok.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

**Depok, 16 Januari 2018**  
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan**  
**dan Penelitian Pengembangan Daerah**  
**Kota Depok,**

**Ir. Widyati Riyandani**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681216 199403 2 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	1
1.3 Permasalahan Yang Dihadapi	.....	3
1.4 Prioritas Pembangunan	.....	3
1.5 Tugas dan Fungsi Bappeda	.....	4
1.5.1 Tugas dan Fungsi Bappeda	.....	4
1.5.2 Tugas dan Fungsi Bappeda	.....	4
1.5.3 Struktur Organisasi	.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	.....	6
<b>BAB 2 RENCANA STRATEGIS</b>	.....	<b>7</b>
2.1 Visi	.....	7
2.2 Misi	.....	8
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	.....	9
<b>BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2018</b>	.....	<b>14</b>
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	.....	<b>32</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Terkait dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Depok Tahun 2018 maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Depok Tahun 2018. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target Kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 merupakan tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian Visi, Misi dan tujuan Bappeda Kota Depok, serata sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 bagi Kepala Bappeda Kota Depok kepada Wali Kota Depok.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah.
19. Peraturan Walikota Depok Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian Dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

21. Perwa Depok Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwa Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
22. Peraturan Wali Kota Depok Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

### **1.3 Permasalahan Yang Dihadapi**

Dalam pelaksanaan tupoksi, Bappeda dihadapkan pada permasalahan dan factor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi Bappeda Kota Depok
2. Pengendalian dan evaluasi yang terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
3. Peningkatan kompetensi aparatur Bappeda Kota Depok di bidang perencanaan, pengendalian dan teknologi agar dapat menghasilkan produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien.
4. Teroganisirnya basis data dan informasi pembangunan agar lebih mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Peningkatan hasil kajian yang berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan dan dapat dimanfaatkan stakeholder dan masyarakat.

### **1.4 Prioritas Pembangunan**

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan program dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh instansi.

RKT disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai,

ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Berdasarkan hal tersebut, dokumen RKT memuat indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Penyusunan RKT dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

## **1.5 Tugas dan Fungsi**

### **1.5.1 Tugas dan Fungsi Bappeda**

Penjabaran Tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.5.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan**

Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok. UPTB adalah pelaksana untuk urusan penunjang Pemerintahan dalam bidang Penelitian dan pengembangan pada Bappeda.

### 1.5.3 Struktur Organisasi

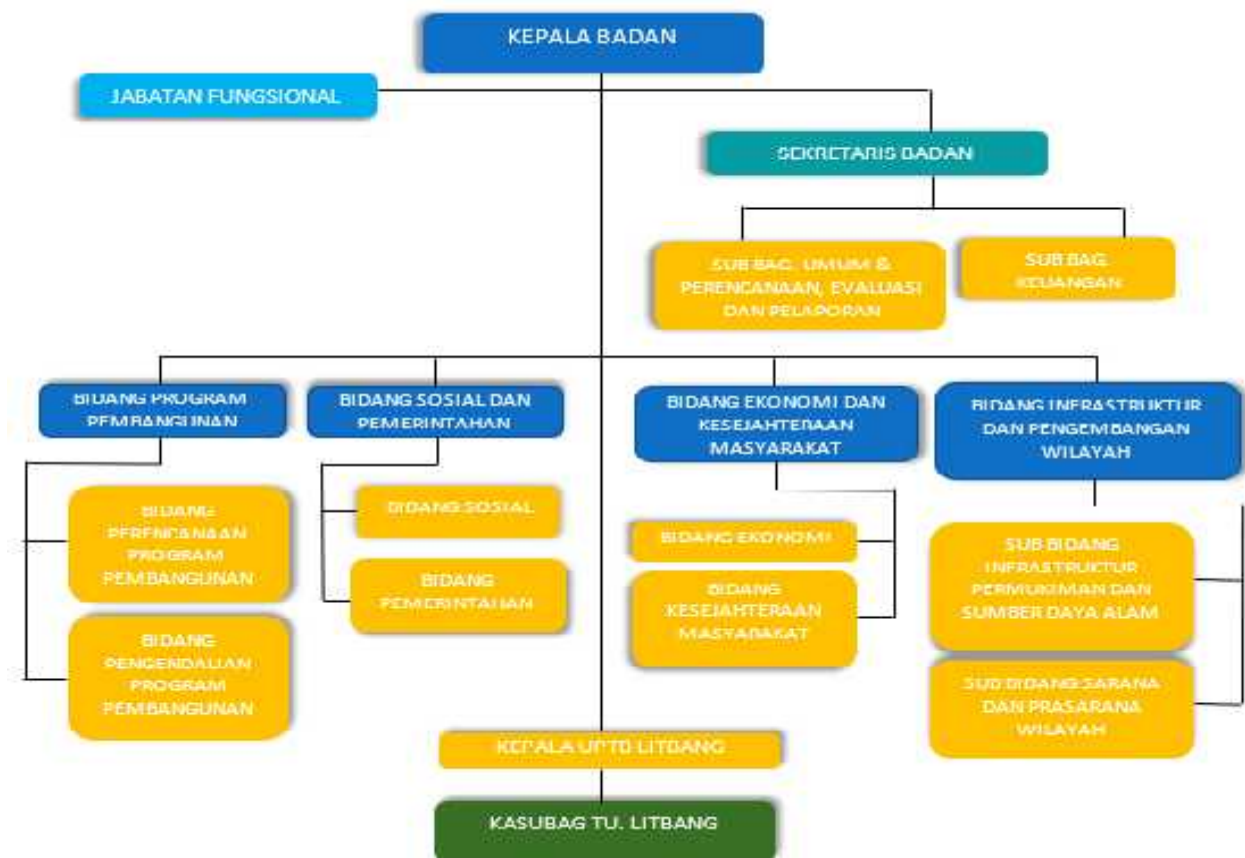
Berdasarkan Peraturan Walikota Depok No. 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Depok, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Program, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Program;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Program.
3. Bidang Sosia dan Pemerintahan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
4. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Infrastruktur Pemukiman dan Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.5  
Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok



## 1.6 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, permasalahan utama, Prioritas Pembangunan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan.

### BAB II RENCANA STRATEGIS

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis

### BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dalam bab ini menggambarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .

### BAB IV PENUTUP

# BAB 2 RENCANA STRATEGIS

---

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Depok sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Depok, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Kota Depok melalui berbagai Program dan kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target capaian, program dan kegiatan, serta Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung dokumen rencana Strategis Bappeda Kota Bandung dan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana target capaiannya

## 2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016 – 2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

***“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”***

**Unggul** didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

**Nyaman** didefinisikan sebagai :

Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

**Religius** didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## **2.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

### 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021. Program yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	1.	Meningkatnya standar pelayanan public	Meningkatkan standarisasi pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan standarisasi pelayanan publik	Peningkatan standarisasi pelayanan publik
				Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan program pembangunan	Penerapan Akreditasi dalam penyusunan perencanaan program pembangunan	
		2.	Meningkatnya kualitas aparatur Bappeda yang berwawasan global	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
2.	Meningkatkan	1.	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kualitas	peningkatan transparansi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sistem</li> </ul>

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan		manajemen pemerintahan yang akuntabel pada Bappeda	pengelolaan keuangan pada BAPPEDA	akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA	Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>
			Meningkatkan peran Bappeda dalam menyusun perencanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatkan peran Bappeda dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK)	Peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
			Meningkatkan kerjasama daerah	Peningkatan kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan kerjasama daerah
	2.	Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
	3.	Terwujudnya data dan informasi dalam penyusunan dokumen	Peningkatan kualitas sistem layanan perencanaan, dan pengendalian pembangunan	Pengelolaan dan pengembangan sistem layanan perencanaan, dan pengendalian	Pengembangan layanan teknologi informatika

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program
			perencanaan pembangun daerah yang berkualitas	berbasis IT	pembangunan berbasis IT	
		4.	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan yang terpusat dan terintegrasi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
Misi II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program
3.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	1.	Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset/penelitian	Peningkatan kegiatan riset serta kajian yang mampu memberikan rekomendasi untuk pembangunan	Penguatan pokja jaringan penelitian serta peningkatan kegiatan-kegiatan riset dan penelitian kebijakan pembangunan Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi	Peningkatan riset/penelitian dan inovasi pembangunan
Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program
4.	Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan	1.	Meningkatnya sinergi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
5.	Meningkatkan	2.	Meningkatnya hasil inovasi	Mengembangkan SIDA	Peningkatan Kapasitas Sistem	Peningkatan riset/penelitian dan

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program
Inovasi daerah dan Sinergitas Pembiayaan dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal			daerah yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal		Inovasi Daerah	inovasi pembangunan
	3.		Meningkatnya Sinergi Pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah	Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat , Provinsi Jawa Barat , daerah lain dan swasta	Pembiayaan bersama dengan Pemerintah Pusat , Provinsi Jawa Barat, daerah lain, dan swasta	Sinergi perencanaan dan Pengelolaan anggaran daerah
Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
6.	Mewujudkan konsistensi penataan ruang	1.	Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
Misi V : Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara						
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
7.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam		Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Rencana Pembangunan dan	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Rencana Pembangunan dan	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sosialisasi	Gerakan Sadar Hukum

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		



# BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dokumen RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Depok sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Depok, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Depok melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan Bappeda terhadap OPD	Survey kepuasan OPD terhadap pelayanan Bappeda	baik
		Terakreditasinya Penyusunan perencanaan program pembangunan	1 Sertifikat
2	Meningkatnya kualitas aparatur Bappeda yang berwawasan global	Prosentase aparatur bappeda pada bintek perencanaan	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP BAPPEDA	B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan	Prosentase OPD dengan Realisasi Kinerja $\geq 65\%$	89.82%
		Nilai SAKIP Kota Depok	B
5	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi berbasis IT dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Prosentase pemanfaatan data dan informasi dari sistem layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan	100%
6	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Prosentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	77%
		Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan Renja OPD dengan RKPD	100%
7	Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset/penelitian	Cakupan kerjasama dengan perguruan tinggi	100%
		Prosentase hasil riset/penelitian yang mendukung pengembangan Sumber Daya yang Kreatif, dan Berdaya Saing	100%
8	Meningkatnya sinergi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan	Tingkat keselarasan kegiatan OPD yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan	14.62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
9	Meningkatnya hasil inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal	Prosentase hasil inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal	30%
10	Meningkatnya Sinergi Pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah	Prosentase bantuan pembiayaan yang bersumber dari Pusat, Propinsi dan Daerah lain dalam APBD Kota Depok	6.40%
11	Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Tingkat partisipasi pemangku kepentingan;	60

**Tabel. 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Depok Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan</b>										
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional</b>										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan Bappeda terhadap OPD	Survey kepuasan OPD terhadap pelayanan Bappeda	NA	NA	baik	baik	baik	Meningkatkan standarisasi pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan standarisasi pelayanan publik	Peningkatan standardisasi pelayanan publik
		Terakreditasinya Penyusunan perencanaan program pembangunan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan program pembangunan	Penerapan Akreditasi dalam penyusunan perencanaan program pembangunan	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
2	Meningkatnya kualitas aparatur Bappeda yang berwawasan global	Prosentase aparatur bappeda pada bintek perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan pada Bappeda</b>										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP BAPPEDA	CC	B	B	B	BB	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA	peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
							Meningkatkan peran Bappeda dalam menyusun perencanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatkan peran Bappeda dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK)	Peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	
							Meningkatkan kerjasama daerah	Peningkatan kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan kerjasama daerah	
2	Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan	Prosentase OPD dengan Realisasi Kinerja $\geq 65\%$	87.18%	88.05%	88.93%	89.82%	93.47%	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan	Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pengendalian evaluasi dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
	Perencanaan	Nilai SAKIP Kota Depok	CC	CC	B	B	A	pemerintahan daerah	penyelenggaraan pemerintahan	pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
								Peningkatan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana pada Bappeda	Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur pada Bappeda	Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi berbasis IT dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Prosentase pemanfaatan data dan informasi dari sistem layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas sistem layanan perencanaan, dan pengendalian pembangunan berbasis IT	Pengelolaan dan pengembangan sistem layanan perencanaan, dan pengendalian pembangunan berbasis IT	Pengembangan layanan teknologi informatika

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
4	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Prosentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	72%	74%	75%	77%	80%	Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan yang terpusat dan terintegrasi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
		Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%			
		Tingkat keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%			
		Tingkat keselarasan Renja OPD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Misi II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing</b>										
<b>Tujuan 1: Meningkatkan pemanfaatan hasil riset/penelitian dalam mendukung pengembangan Sumber Daya yang Kreatif, dan Berdaya Saing</b>										



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
1	Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset/penelitian	Cakupan kerjasama dengan perguruan tinggi	NA	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kegiatan riset/penelitian yang mampu memberikan rekomendasi untuk pembangunan	Penguatan pokja jaringan riset/penelitian serta peningkatan kegiatan-kegiatan riset/penelitian dan atau kajian kebijakan pembangunan	Peningkatan riset/penelitian dan inovasi pembangunan
	Prosentase hasil riset/penelitian yang mendukung pengembangan Sumber Daya yang Kreatif, dan Berdaya Saing	NA	100%	100%		100%	Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi			
<b>Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</b>										
<b>Tujuan 1 : Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan</b>										

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
Meningkatnya sinergi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan	Tingkat keselarasan kegiatan OPD yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan	13.78%	14.05%	14.33%	14.62%	15.83%	Meningkatkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Inovasi daerah dan Sinergitas Pembiayaan dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal</b>										
1	Meningkatnya hasil inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal	Prosentase hasil inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal	NA	NA	20%	30%	80%	Mengembangkan SIDA	Peningkatan Kapasitas Sistem Inovasi Daerah	Peningkatan riset/penelitian dan inovasi pembangunan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
2	Meningkatnya Sinergi Pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah	Prosentase bantuan pembiayaan yang bersumber dari Pusat, Propinsi dan Daerah lain dalam APBD Kota Depok	6.15%	6.20%	6.30%	6.40%	6.80%	Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, daerah lain dan swasta	Pembiayaan bersama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, daerah lain, dan swasta	Sinergi perencanaan dan Pengelolaan anggaran daerah
<b>Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga</b>										
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan konsistensi penataan ruang</b>										
1	Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Tingkat partisipasi pemangku kepentingan;	NA		50	60	80	Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
		KONDISI AWAL (2015)	TARGET			KONDISI AKHIR (2021)				
			2016	2017	2018					
1	2	3					4	5	6	
							tata ruang			
<b>Misi V : Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</b>										
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>										
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi peraturan daerah PERDA Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kota Depok	0	0	0	0	80	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sosialisasi	Gerakan Sadar Hukum

Memperhatikan hasil evaluasi, isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Dalam mencapai tujuan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan rencana kerja yang terdiri dari 12 program dan 51 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp11.630.204.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Program dan Kegiatan**

<b>NO.</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)</b>
1	2	3
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
I	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building
1	Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan	Jumlah peserta bintek
IV	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Nilai LAKIP OPD; Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan; Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan.
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen
2	Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulan	Jumlah Laporan OPD triwulan (TW I s/d TW IV)
V	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit Pelayanan yang Terakreditasi
1	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Jumlah ISO
2	Sosialisasi Roadmap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah peserta; Jumlah rakor
VI	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan
1	Pelaksanaan Forum/Renja OPD	Jumlah Dokumen
2	Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan RKPD Kota Depok	Jumlah Dokumen
3	Musrenbang RKPD Tahun 2019	Jumlah Peserta
4	Penyusunan Study Kelayakan TOD (Transit Oriented Development) di Kawasan Sekitar Stasiun	Jumlah Dokumen

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
5	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pencemaran DAS Ciliwung di Wilayah Kota Depok	Jumlah Dokumen
6	Kajian Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Dokumen Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan
7	Persiapan Pembentukan BLUD Pasar	Jumlah Dokumen
8	Penyusunan Pra Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)	Jumlah Dokumen
9	Kajian Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah Dokumen
10	Penyusunan Neraca Sosial Ekonomi	Jumlah Dokumen
11	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen
12	Kajian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pembangunan	Jumlah Dokumen
13	Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Akses dari dan menuju Kawasan TOD (Transit Oriented Development) Cibubur	Jumlah Dokumen
14	Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Kota Depok	Jumlah Dokumen
VII	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Kota; Kategori LPPD; Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ dan AMJ)
1	Penyusunan LKPJ Walikota Depok	Jumlah dokumen

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
2	Sinergitas Program Kota Depok Sehat, Komisi Daerah Lanjut Usia, Kota Layak Anak, dan Pengarusutamaan Gender	jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan Program Kota Depok Sehat, Komisi Daerah Lanjut Usia, Kota Layak Anak, dan Pengarusutamaan Gender
3	Sinergitas Program Kerja Jaringan Penelitian (Jarlit)	Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan Pokja Jarlit
4	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sosial	Jumlah laporan
5	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan
6	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan
7	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan
8	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan
9	Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan
10	Sinergitas Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan
VIII	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi)
1	Pengembangan Sistem Satu Data Kemiskinan (Lanjutan)	Jumlah Sistem yang dikelola
2	Pengelolaan dan Pengembangan RKPD Online Kota Depok	Jumlah Sistem



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
3	Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator RPJMD	Jumlah Sistem
4	Pemutakhiran Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	Jumlah Sistem (Pengolahan Informasi Data Spasial Daerah)
5	Forum Pengelola Data Spasial	Jumlah Laporan
6	Pembuatan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Sistem
IX	Gerakan Sadar Hukum	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Perda daa/atau Perwa
1	Sosialisasi Perda RP3KP Kota Depok	Jumlah Peserta
X	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Jumlah kegiatan; Jumlah dokumen
1	Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Kegiatan
2	Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah Dokumen
XI	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase tingkat kemiskinan
1	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah Movev; Jumlah FGD/Rakor; Jumlah Dokumen Laporan
XII	Peningkatan Penelitian dan Inovasi Pembangunan	Jumlah Riset/ Penelitian; Jumlah Inovasi; Jumlah Dokumen
1	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah Inovasi yang dikembangkan
2	Penelitian Inovatif	Jumlah Penelitian

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
3	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen

# BAB 4 PENUTUP

---

RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Depok untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Depok selama periode satu tahun. Penyusunan RKT Bappeda Kota Depok disusun agar terwujudnya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Adapun sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT tahun 2018 adalah Bappeda Kota Depok berkewajiban melaksanakan program dalam RKT tahun 2018 untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Pada akhir tahun 2018, Bappeda Kota Depok berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Bappeda Kota Depok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam periode tahun 2018. Bappeda Kota Depok harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja Bappeda Kota Depok ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan tersusun RKT Bappeda Kota Depok Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target tahunan yang hendak diwujudkan Bappeda Kota Depok Tahun 2018.